Siasat Gelap Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19

Pencegahan Berbasis Religi dan Seni

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diguncang politik. Korupsi di tengah pandemi Covid-19 merajalela, siasat gelap mulai terkuak. Koruptor dana Covid-19 menggurita, mulai dari aparat desa, bupati, sampai menteri.

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mencatat jumlah korupsi tahun 2020 mencapai 1.219 kasus. Lebih tinggi dari 2019 yang julmlahnya lebih kecil, yakni 1.019 perkara.

Novel Baswedan, sebelum dinonaktifkan, menduga korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 mencapai Rp 100 triliun. Wajar jika Indeks Persepsi Korupsi Indonesia merosot drastis dari 40 pada tahun 2019 menjadi 38 di tahun 2020.

Pemberantasan korupsi di tengah pandemi Covid-19 tidak cukup dengan penegakan hukum. Bahkan, ancaman hukuman mati bagi koruptor dana Covid-19 tidak membawa efek jera. Buktinya, China yang sudah menerapkan hukuman mati pun masih banyak praktik korupsi.

Ironisnya, pasal 27 Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, yang disebut-sebut sebagai pasal imunitas, justru memicu korupsi yang sebesar-besarnya. Padahal, Green (2005) menyebutkan bahwa korupsi dana bencana adalah bencana itu sendiri. Oleh karena itu, Mietsner (2020) menyebutkan bahwa korupsi dana Covid-19 berakibat langsung terhadap meningkatnya angka fatality rate di sebuah negara.

Bahkan, semua agama mengutuk praktik korupsi. Dalam Islam, korupsi merupakan dosa besar atau syirik akbar. Dosa korupsi tidak hanya ditangung oleh pelaku. Namun, juga anak, istri, dan seluruh anggota keluarga yang menikmati harta haram korupsi. Dalam Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhamamdiyah, korupsi setara dengan ghulul, riswah, khianat dan akhlussuht (QS. 5: 62-63).

Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan korupsi di tengah pandemi Covid-19 secara terstruktur dan sistematis, mulai dari tingkat desa, kabupaten/kota, hingga kementerian. Pencegahan korupsi di tengah pandemi Covid-19 tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum. Melainkan, juga kesehatan, sosial, ekonomi, agama, dan seni. Bahkan, neurosains (Suyadi, 2019).

Garda depan pencegahan korupsi adalah Penyuluh antikorupsi. Penyuluh antikorupsi berasal dari berbagai profesi seperti agamawan, budayawan, dosen, dan lain sebagainya. Me-

Oleh:
Dr. SUYADI, M.PD.I

reka memiliki panggilan jiwa untuk bergelut dengan pencegahan korupsi dan dinyatakan lulus dalam program sertifikasi.

KPK membutuhkan minimal tujuh ribu penyuluh antikorupsi. Namun, hingga Maret 2021, KPK baru mampu menyertifikasi 1.418 penyuluh antikorupsi.

Penyuluh antikorpsi berpotensi masuk ke berbagai sektor dan kelembagaan mulai dari tingkat desa hinga kabupaten/kota dan kementerian. Mereka masuk bukan untuk melakukan penyidikan dan penindakan. Melainkan, edukasi dan pencegahan.

Aksi para penyuluh antikorupsi adalah membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Mereka memiliki program dan agenda serta aksi-aksi yang nyata untuk pencegahan korupsi. Bahkan, penyuluh antikorupsi dapat berkoordinasi dengan Unit Penggerak Integritas (UPI) di tiap-tiap lembaga untuk memberikan sosialisasi, coaching, penyuluhan, kajian sistem, fasilitasi, dan bentuk-bentuk kegiatan nyata lainnya.

Dalam hal ini, Kelurahan Prenggan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, telah dipilih KPK sebagai Zona Integritas desa antikorupsi sejak tahun 2013. Kalurahan ini memiliki relawan antikorupsi yang terikat dalam organisasi Keluarga Jujur dan Bahagia Prenggan.

Konsep yang diusung sangat menarik. Pencegahan korupsi tidak harus dimulai dari skala besar. Namun, justru lebih realistik dari skala kecil, yakni keluarga. Tidak harus dari pusat. Tetapi, bisa dari bawah *(bottom up)*.

Hadirnya Tim Pengabdi dari Universitas Ahmad Dahlan (UAD), yang juga penyuluh antikorupsi, berusaha memperkuat Zona Integritas di Kelurahan Prenggan. Berangkat dari keberhasilan integritas di tingkat keluarga menuju organisasi dan kelompok mitra yang lebih luas. Terutama Paguyuban Mubaligh Prenggan. Salah satu aset budaya religius Kelurahan Prenggan adalah seni karawitan yang dikelola oleh Paguyuban Mubaligh Prenggan.

Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT) yang didukung penuh Kemendikbudristek, aksi nyata Tim pengabdi adalah kolaborasi dengan Paguyuban Mubaligh Prenggan, mengembangkan dakwah kultural secara virtual melalui seni karawitan. Mulai dari mencptakan lagu atau Gendhing Antikorupsi, melatihkannya hingga mementaskan secara virtual.

Pencegahan korupsi berbasis seni karawitan merupakan kearifan lokal di ruang virtual yang berdampak kultural dan struktural. Pencegahan korupsi dengan pendekatan agama dan seni di ruang digital menimbulkan kesan mental yang lebih aktual. Jauh dari kesan seram, kejam, dan garang.

Dengan demikian, akademisi harus mengabdi pada masyarakat. Mengabdi dengan sentuhan seni dan religi untuk pencegahan korupsi di tengah pandemi Covid-19.

**) Penulis Adalah Kaprodi S2 Pendidikan Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan, Penyuluh Antikorupsi, Anggota Majelis Dikdasmen PWM DIY dan Tim Asistensi Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.*

TELEKOMUNIKASI

Identitas Baru sebagai Simbol Perubahan

JOGJA, *Radar Jogja* – Telkomsel berkomitmen untuk terus beradaptasi dan relevan dalam menghadirkan perubahan, yang dapat menjawab berbagai tantangan yang datang seiring dengan perkembangan zaman. Komitmen tersebut kali ini diwujudkan oleh Telkomsel melalui kelanjutan peta jalan transformasi digital perusahaan yang lebih komprehensif.

Pembaharuan Telkomsel semakin memperkuat visi dan misi perusahaan, dalam membuka semua peluang bagi masyarakat untuk dapat #BukaSemuaPeluang, dengan memaksimalkan potensi mereka di segala aspek kehidupan, melalui kemungkinan yang tanpa batas.

Masyarakat bisa langsung melihat perubahan signifikan pada pembaharuan identitas hingga produk dan layanan Telkomsel, yang lebih terintegrasi dan *customer-centric* seiring dengan komitmen sebagai perusahaan telekomunikasi digital terkemuka di Indonesia, yang resmi diumumkan di Jakarta, (18/6).

Direktur Utama Telkomsel, Hendri Mulya Syam menjelaskan pihaknya secara konsisten dalam melanjutkan transformasi dan terus menjadi landasan dalam menjadikan produk dan layanan Telkomsel, sebagai pilihan terbaik bagi pemenuhan gaya hidup digital masyarakat. Telkomsel yang baru ini juga akan membuka berbagai peluang dan kemungkinan pemanfaatan teknologi digital terkini secara efektif, dengan kolaborasi lintas sektor yang dapat lebih memberdayakan setiap lini kehidupan bangsa, sekarang dan di masa depan.

"Dengan cara ini, komunitas, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya akan membuat Indonesia semakin terhubung," jelas Hendri.

Pembaharuan identitas Telkomsel, ditandai dengan hadirnya desain logo baru yang terinspirasi pola batik sebagai identitas budaya Indonesia. Penggunaan warna merah dan putih yang telah menjadi ciri khas Telkomsel kini akan dilengkapi dengan warna sekunder yaitu merah tua, biru navy, kuning kunyit, abu-abu dan hitam, untuk memunculkan semangat excitement dan *friendliness*.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia Republik Indonesia, Erick Thohir mengaku bersyukur dan bangga, selama 26 tahun Telkomsel telah menggiring tiap langkah dan aspek kehidupan dengan berbagai inovasi dan solusi, termasuk 5G yang baru diluncurkan. "Di balik semua itu, kepercayaan dari pelanggan, karyawan, mitra kerja, pemegang saham, dan pemerintah telah membuat Telkomsel berdiri tegak seperti sekarang," tegasnya. **(vis/bah/rg)**

ISTIMEWA

LEBIH SEGAR: Telkomsel memperkenalkan simbol barunya di Jakarta.

Terapkan Lagi Sanksi Menyapu Jalan

Bagi Para Pelanggar Prokes

KULONPROGO, *Radar Jogja* – Pemkab Kulonprogo kembali menerapan sanksi sosial bagi masyarakat yang kedapatan melanggar protokol kesehatan (prokes). Sebanyak 25 pelanggar prokes di wilayah Kulonprogo yang kedapatan melanggar prokes disanksi menyapu jalan perkotaan.

Kepala Satpol PP Kulonprogo Sumiran mengatakan, operasi yustisi tersebut digelar guna mensikapi tingginya kasus penularan Covid-19 di wilayah Kulonprogo. Dalam operasi, yang digelar kemarin (22/6) pagi petugas menyasar pengguna jalan dan pengunjung di Pasar Glaheng, Kapanewon Temon.

Sumiran menyampaikan bahwa akhir-akhir ini kasus konfirmasi positif Covid-19 di wilayah Kulonprogo memang cenderung mengalami peningkatan. Dimana penyebabnya dimungkinkan karena kurangnya penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Sehingga perlu ada kegiatan untuk menyadarkan masyarakat tentang upaya pencegahan virus.

"Kegiatan ini akan kami laksanakan dalam tiga kali seminggu dan menyasar tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Seperti di pasar-pasar tradisional," ujar Sumiran, disela kegiatan kemarin.

Dari hasil penindakan, petugas Satpol PP menemukan sebanyak 25 orang pelanggar yang tidak memakai masker. Masyarakat yang terjaring tersebut kemudian diminta mendatangi surat pernyataan. Serta diberi sanksi sosial berupa menyapu jalan di sekitar pasar.

Dari sejumlah 25 orang pelanggar yang ditindak, lanjut Sumiran, tercatat sembilan diantaranya merupakan masyarakat Kulonprogo. Sementara 16 lainnya adalah warga luar Kulonprogo. Diharapkan seluruh lapisan masyarakat Kulonprogo untuk jangan abai dan kendor dalam menerapkan pendisiplinan prokes. "Ini sebagai upaya pencegahan penularan virus Covid 19," ungkapnya.

DOKUMENTASI SATPOL PP KULONPROGO

EFEK JERA: Pelanggar prokes tengah menyapu jalan di Kulonprogo. Kegiatan tersebut sebagai sanksi bagi warga yang diterapkan kembali oleh Pemkab Kulonprogo. Operasi yang digelar kemarin (22/6) pagi menyasar pengguna jalan dan pengunjung di Pasar Glaheng, Kapanewon Temon.

Terkait dengan perkembangan kasus Covid-19 di Kulonprogo, juru bicara gugus tugas penanganan Covid-19 Kulonprogo, Baning Rahayujati mengatakan hingga Senin (21/6) tercatat total kasus Covid-19 di Kulonprogo menjadi 7.148 kasus.

Dari jumlah tersebut 91 kasus diantaranya menjalani isolasi di rumah sakit, 974 kasus isolasi mandiri, 5.411 kasus telah selesai isolasi, 534 kasus dinyatakan sembuh dan 138 kasus meninggal dunia. "Untuk Senin ada penambahan sebanyak 106 kasus. Sehingga total konfirmasi positif di Kulonprogo menjadi 7.148 kasus," ujar Baning. **(inu/bah/rg)**

Pemkab Tak Mampu Sokong Shelter Kalurahan

BANTUL, *Radar Jogja* – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul mengeluarkan kebijakan untuk menambah jumlah shelter pasien Covid-19. Termasuk mendorong kalurahan untuk menyediakan shelter. Namun, pemkab meminta pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh kalurahan.

"Sheter yang di kalurahan tentu kami harapkan mereka mandiri (yang kelola, Red)," cetus Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis kepada wartawan.

Pernyataan Helmi tersebut ditujukan kepada kalurahan yang minim anggaran, dalam upaya menyiapkan shelter bagi terkonfirmasi Covid-19. Termasuk penyediaan biaya operasional dan logistik yang dibutuhkan guna penyelenggaraan shelter. "Bisa (berkoordinasi dengan, Red) lembaga atau perorangan," ujarnya.

Selanjutnya, pemkab meminta pemerintah kalurahan untuk bergotong royong. Dapat melalui komunikasi bersama warga atau pihak yang dinilai peduli. Selebihnya, pemerintah kalurahan diminta menggunakan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan (APBKal). Lantaran, pemkab hanya mampu menyokong sarana yang dibutuhkan, misalnya kompor gas dan kasur. "Tapi untuk kebutuhan harian, kami minta mereka berembug di kapanewon, bersama lurah, bamuskal, dan pihak terkait," ucapnya.

Dibeberkan, Pemkab Bantul menyisakan Rp 7,9 miliar dalam anggaran belanja tidak terduga (BTT). Namun, dana tersebut tidak hanya dipergunakan untuk penanganan Covid-19, tapi juga penanganan kebencanaan atau kebutuhan mendesak kabupaten. "Semua kebutuhan mendesak bisa menggunakan BTT, kalau dibutuhkan dan anggaran lebih dari anggaran BTT, kami akan melakukan *refocusing*. Bupati sudah memberikan lampu hijau," kata Helmi.

Terpisah, Carik Kalurahan Sabdodadi, Triyono membeberkan minimnya kemampuan penyediaan shelter. Memanfaatkan bangunan bekas SD Sabdodadi 2, shelter bahkan diampu oleh tiga kalurahan, yaitu Sabdodadi, Ringinharjo, dan Bantul. "Ada lima ruangan, satu ruang bisa untuk enam orang. Kami terkendala di logistik dan penjaga," keluhnya.

Saat ini shelter merawat empat orang terkonfirmasi Covid-19. Kebutuhan logistik masih dapat diatasi. Sebab keluarga yang anggotanya berada di shelter, kerap mengirimkan bantuan. Termasuk warga sekitar yang memiliki kepedulian, kerap menyokong makanan. "Tapi untuk penjaga, kami harus menganggarkan sekitar Rp 250 ribu sampai Rp 300 ribu per hari. Ini menjadi kendala terberat kami," ucapnya. **(fat/bah/rg)**

Tekan Penularan Covid-19, Kunjungan Objek Wisata Dibatasi 25 Persen

SLEMAN, *Radar Jogja* – Pariwisata di Sleman tetap berjalan di tengah merebaknya angka kasus Covid-19. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman tidak ingin gegabah menutup objek wisata (obwis). Kendati begitu, jumlah kunjungan dibatasi 25 persen dari kapasitas obwis.

"Dengan membatasi jumlah kunjungan tersebut, diharapkan kerumunan dapat ditekan," kata Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo di Gedung DPRD Sleman kemarin (22/6).

Dijelaskan, di luar zona merah obwis tetap dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Pariwisata tetap dibuka seperti biasa, termasuk saat *weekend*. Pengelola wisata diimbau agar melakukan pengawasan ketat terhadap prokes, berkoordinasi dengan satuan gugus tugas (satgas) padukuhan.

Pengawasan di antaranya, terkait cuci tangan, memakai masker, mengukur suhu badan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. "Kalau ada yang melanggar langsung kami tegur," tegasnya.

Dikatakan meski kasus Covid-19 di Sleman tinggi, pariwisata tetap harus ditumbuhkan untuk menghidupkan perekonomian warga. Terlebih, saat ini pariwisata Sleman dinilai mulai bangkit, setelah setahun dihujam pandemi.

Lain halnya obwis yang berada di zona merah dalam lingkup padukuhan, maka obwis tersebut harus ditutup. Sesuai dengan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro dalam Instruksi Bupati (Inbup) Sleman Nomor 14 tahun 2021. "Kemarin *Ngarso Dalem* (Gubernur DIJ Hamengku Buwono X) *ngendiko* (mengatakan) begitu, tidak ada penutupan pariwisata," ucapnya.

KUSTINI SRI PURNOMO

MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA

Sementara Itu Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Sleman, Suparmono menambahkan pengawasan ketat dilakukan oleh satgas Covid-19 yang telah terbentuk di masing-masing obwis. Seperti halnya di wisata Klangon dan Teras Merapi Glagaharjo, Cangkringan.

Disebutkan, pada saat ini, petugas sudah menjalankan sebagaimana aturan masuk bagi pengunjung. Termasuk memberikan peringatan setiap setengah jam sekali agar prokes tetap dijalankan dengan baik.

Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan satgas kalurahan dan kapanewon termasuk unsur TNI/Polri agar turut membantu dalam pengamanan obwis. "Untuk Sabtu dan Minggu ini kami akan koordinasikan di internal apakah personel akan ditambah dalam pengawasan atau tidak," katanya.

Disamping itu pihaknya mendorong agar pariwisata Sleman tetap dapat bergeliat dengan adaptasi kebiasaan baru, dengan meningkatkan promosi digital. **(mel/bah/rg)**